

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK DENGAN SISTEM PENGOMPOSAN

Hariato¹Zulin Nurcahayati²

¹FISIP, Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu 79 Madiun 63118

E-mail: hariato@unmer-madiun.co.id

Abstract. The purpose of the study was to determine the implementation of the Magetan Regency Regional Regulation Number 1 of 2016 concerning Organic Waste Processing with a Composting System. The population in the study included the Head of the Magetan Regency Environmental Service, the Head of the Hygiene Section, janitors and the community, totaling 100 people. Data collection techniques using questionnaires, observation and documentation. While the data analysis used quantitative descriptive analysis. The results of the study indicate that the implementation of the Waste Management Policy based on the Magetan Regency Regulation Number 1 of 2016 concerning Organic Waste Processing with a Composting System can be categorized as very good.

keywords: local regulations, organic waste, composting

I. PENDAHULUAN

Kebersihan merupakan suatu keadaan yang bebas dari segala kotoran, dan lain-lain yang dapat merugikan segala aspek yang menyangkut setiap kegiatan dan perilaku masyarakat. Untuk mewujudkan kebersihan lingkungan, dibutuhkan kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan. Lingkungan adalah tempat hidup semua makhluk yang ada di bumi, khususnya manusia. Menurut Hendrik L. Blum dalam Slamet (2016:4), menyatakan bahwa “lingkungan adalah faktor terbesar dalam mempengaruhi derajat kesehatan, sehingga menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab masyarakat”. Peran masyarakat sangat penting dalam menjaga lingkungan, sebab masyarakat dituntut mampu menyelesaikan permasalahan menyangkut lingkungan hidupnya. Salah satu permasalahan lingkungan hidup adalah tentang kebersihan. Kebersihan dapat dihubungkan dalam pengelolaan sampah. Menurut Mulasari (2012), sampah adalah “suatu benda atau bahan yang sudah tidak digunakan lagi oleh manusia sehingga dibuang. Stigma masyarakat terkait sampah adalah semua sampah itu menjijikkan, kotor, dan lain-lain sehingga harus dibakar atau dibuang sebagaimana mestinya.” Segala aktivitas masyarakat selalu menimbulkan sampah. Hal ini tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah akan tetapi juga dari seluruh masyarakat untuk mengolah sampah agar tidak berdampak negatif bagi lingkungan sekitar. (Hardiatmi S., 2011) Membangun kesadaran masyarakat tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu kerjasama dari semua pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun pihak ketiga sebagai pendukung. Diperlukan waktu yang cukup lama untuk membangun kesadaran itu. Diperlukan pula contoh dan teladan yang positif serta konsistensi dari pihak pengambil kebijakan di suatu wilayah tertentu. Kegiatan sosialisasi secara langsung tentang pengelolaan sampah dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan persampahan.

Menurut Sahil (2016), beberapa faktor yang mempengaruhi pengolahan sampah yang dianggap sebagai penghambat sistem adalah penyebaran dan kepadatan penduduk, sosial ekonomi dan karakteristik lingkungan fisik, sikap, perilaku serta budaya yang ada di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 3 tahun 2013, tempat penampungan sementara (TPS) adalah tempat dimana sebelum sampah diangkut untuk dilakukan pendauran ulang, pengolahan dan tempat pengolahan sampah terpadu. Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) adalah tempat pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Menurut EPA (*Environmental Protection Agency*) 1998 mengatakan bahwa, *illegal dumping*/ tempat penampungan ilegal adalah suatu tempat yang secara sengaja dilakukan pembuangan sampah di daerah tersebut untuk menghindari biaya dan waktu serta upaya yang diperlukan membuang sampah ke tempat yang legal. Lahan yang dimanfaatkan bervariasi seperti bangunan yang tidak beroperasi lagi, lahan kosong, jalan raya atau gang-gang sepanjang jalan pedesaan. Hal ini dikarenakan penerangan dan aksesibilitas yang buruk sehingga rentan digunakan untuk tempat pembuangan sampah ilegal. Faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah jumlah penduduk, karakteristik fisik (tidak tersedianya lahan), rendahnya alternatif pengelolaan sampah (daur ulang), dan kebijakan pemerintah. Tempat penampungan sementara (TPS) ilegal menandakan rendahnya perilaku masyarakat sekitar dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Dampak berupa pemandangan yang tidak enak, ketidaknyamanan ketika bernafas dikarenakan bau yang relatif tidak sedap, dan estetika, serta mencemari lingkungan serta terganggunya kondisi perairan. (Asti M. S. Dan Sulistyawati. (2014).

Menindaklanjuti kebijakan nasional pembangunan bidang persampahan (Undang-undang No. 18 Tahun 2008 dan Permen PU No. 21/PRT/M/2006) yang salah satu targetnya adalah pengurangan volume sampah melalui program 3R (*reduce, reuse, recycle*) diperlukan kesadaran dan komitmen seluruh *stakeholder* termasuk kelompok masyarakat dan dunia industri sebagai penghasil sampah dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Dalam perencanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Magetan telah mengadopsi paradigma baru, yaitu penerapan metode pembatasan, pengurangan dan pemanfaatan sampah semaksimal mungkin melalui metode 3R sehingga jumlah sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi berkurang. Dengan daerah layanan 8 kelurahan kondisi sarana dan prasarana yang ada masih mencukupi untuk pelayanan pengelolaan sampah yang ada. Organisasi yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam pengelolaan sampah adalah Dinas Lingkungan Hidup, UU Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah menjadi landasan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Magetan. Anggaran pengelolaan sampah berasal dari APBD Kabupaten Magetan 60%, APBN 25%. dan masyarakat 15%. Selain memaksimalkan pelayanan operasional pengarahannya terhadap masyarakat dilakukan dengan rekayasa sosial diantaranya melalui pengembangan bank sampah dan program 3R. Dalam proses pengelolaan sampah di Kabupaten Magetan, pengawasan dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan.

Seiring dengan perkembangan Kabupaten Magetan, keberadaan sampah harus ditangani secara serius karena apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan dan pencemaran lingkungan yaitu tanah, air dan udara. Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Magetan yang dibangun pada Tahun 1997 seluas 2,5 Ha saat ini sudah *overload* sehingga dibangun TPA yang baru seluas 1,5 Ha pada Tahun 2011. Dengan asumsi masa pakai TPA adalah 8 tahun, maka apabila manajemen persampahan yang lama masih digunakan TPA Milangasri akan habis masa pakainya pada Tahun 2019. Untuk memaksimalkan tempat pembuangan sampah akhir, Dinas Lingkungan Hidup telah mempersiapkan tempat baru di Desa Botok Kecamatan Karas Kabupaten Magetan seluas 4,9 hektar.

Pengelolaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan. Jadi selain pengurangan perlu menjadi perhatian adalah penanganan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan dan Pemrosesan Akhir di TPA. Pengelolaan yang terpadu mulai dari sumber hingga hilir akan meminimalkan dampak yang timbul dari seperti timbulnya berbagai penyakit, pencemaran lingkungan baik air, udara dan tanah. Dengan pengelolaan yang baik justru akan menjadi sumber daya yang bermanfaat dan dapat menjadi sumber energi terbarukan.

Masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Magetan belum berjalan dengan baik, masih banyak hambatan khususnya tempat penampungan pembuangan sampah. Hal ini teridentifikasi dari hasil observasi (pengamatan) menunjukkan permasalahan sampah terjadi karena pengelolaan sampah yang kurang baik dan menimbulkan pencemaran yang akhirnya mengganggu keindahan dan kebersihan kota. Selain itu kurangnya kesadaran warga dalam menjaga kebersihan dan membuang sampah sembarangan.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan sebagai pokok masalahnya adalah Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2016 Di Kabupaten Magetan ?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengolahan Sampah Organik Dengan Sistem Pengomposan.

II. METODE PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Moch Nasir (2013:63) adalah sebagai berikut : Suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kilas peristiwa pada masa sekarang. Dan tujuannya adalah membuat deskriptif atau gambaran atau lukisan secara sistematis, actual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan menurut Koentjoroningrat (2008:92) menjelaskan bahwa : Penelitian yang deskriptif, bertujuan menggambarkan secara cepat sifat-sifat individu suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara satu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dalam hal ini mungkin belum tergantung dari sedikit banyaknya pengetahuan tentang masalah yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengolahan Sampah Organik Dengan Sistem Pengomposan.

2.2. Variabel dan Indikator

Sebelum mengetahui variabel dan indikator dalam penelitian, terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan variabel dan indikator. Menurut Suharsimi Arikunto (2012) "Variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian." Sedangkan Indikator menurut Suharsimi Arikunto (2012) adalah "memecah variabel menjadi kategori-kategori data yang harus dikumpulkan oleh peneliti." Dalam penelitian ini terdapat variabel tunggal yaitu evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengolahan Sampah Organik Dengan Sistem Pengomposan di Kabupaten Magetan. Indikator diambil dari tujuan pengelolaan sampah berdasarkan Perda

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengolahan Sampah Organik Dengan Sistem Pengomposan Di Kabupaten Magetan kutipan nomor 23 yaitu:

1. Terwujudnya pengolahan sampah organik menjadi kompos;
Kegiatan pengomposan sampah organik dilaksanakan terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
2. Meningkatkan kualitas lingkungan di Daerah;
Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan pariwisata, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya wajib menyediakan tempat sampah dan tempat pengolahan sampah dengan TPS 3R.
3. Memanfaatkan sampah organik sebagai sumber daya yang bernilai ekonomis;
Sampah menumpuk bisa disulap menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi. Tutup botol plastik, misalnya, dapat disusun dan dikemas menjadi sebuah wadah berbentuk tabung untuk menyimpan alat tulis.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah organik menjadi kompos; dan
Sampah organik yang berbentuk dedaunan dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak seperti kambing, sapi dan hewan herbivora lainnya. Selain itu, dapat juga dibuat menjadi pelet untuk makanan ayam dan ikan.
5. Melindungi sumber daya air, tanah, dan udara.
Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Daerah yang berisi arah kebijakan dan program penanganan pengolahan sampah untuk melindungi sumber daya air, tanah dan udara.

2.3. Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sutrisno Hadi (2009) populasi adalah “individu-individu atau obyek secara keseluruhan yang menjadi sasaran atau tempat penelitian yang tidak saja berupa manusia tetapi juga berupa alat, keadaan, atau tempat dan sebagainya”. Populasi dalam penelitian sejumlah 100 orang, yang meliputi:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan sejumlah 1 orang
2. Kepala Bidang Kebersihan sejumlah 1 orang
3. Petugas kebersihan sejumlah 20 orang
4. Masyarakat sejumlah 78 orang

2.4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Seperti yang dikatakan Nasution, (2008:81) menurut jenisnya sumber data dibedakan menjadi :

- a. Sumber data primer yaitu data dapat diperoleh langsung dari lapangan
- b. Sumber data sekunder yaitu dari bacaan, surat-surat pribadi, kitab harian, rapat-rapat atau perkumpulan sampai dokumen resmi dari berbagai instansi-instansi.

Berdasarkan pendapat di atas, maka sumber data primer dalam penelitian ini meliputi pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pengelolaan sampah. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah Profil Kabupaten Magetan dan Dinas Lingkungan Hidup.

2.5. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Angket/kuesioner

Kuesioner (angket) adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara memberikan beberapa pertanyaan kepada responden. Namun teknik pengumpulan data melalui kuesioner (angket) ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu mampu menjangkau seluruh aspek, karena jangkauannya luas, namun kelemahannya ialah jawaban yang terisi terkesan asal-asalan dan membuat data yang dihasilkan tidak valid. Metode angket menurut Bungin (2009:123) merupakan “serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh responden. Setelah diisi, angket dikirim kembali atau dikembalikan kepetugas atau peneliti”.

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik yang tidak hanya mengukur dari sikap responden (wawancara dan angket) namun juga mempelajari fenomena atau kondisi yang berada di lingkungan tersebut. Teknik ini digunakan untuk perilaku manusia, gejala-gejala dan proses kerja yang skalanya tidak terlalu besar. Menurut pendapat Sutrisno Hadi (2009) pengertian observasi adalah sebagai berikut: Sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan dengan mata kepala sendiri melainkan dengan jenis pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

3. Dokumentasi

Menurut Nasir (2008:405), dokumentasi dari asal kata dokumen, “yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyediakan benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan lainnya”.

2.6. Analisa Data

Sebelum ditelaah lebih jauh di dalam pengelolaan data, data yang telah terkumpul dari beberapa sumber, yaitu penyebaran angket, dokumentasi atau observasi berupa catatan dilapangan, harus dianalisa dahulu. Dengan tujuan untuk mengelompokkan data-data tersebut melalui metode analisa dengan cara menyusun dan mengolah data yang terkumpul untuk ditarik kesimpulan menuju suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (2009:263) yang dimaksud dengan analisis data adalah : “Proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan”. Jadi proses analisis data adalah pengaturan data secara sistematis dari hasil pengamatan, penyebaran, kuesioner, wawancara, observasi, melalui pengamatan langsung dilokasi, dokumentasi, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan dan pada akhirnya dikelompokkan agar memudahkan pemahaman hasil penelitian kepada orang lain.

Menurut Nawawi (2009:100), analisis data adalah “Pengelompokan data dengan urutan manipulasi data agar dengan mudah untuk dibaca.” Berdasarkan tujuan dan jenis penelitian yang dikemukakan, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskripsi. Untuk interpretasi data menggunakan skala pengukuran yang telah dengan menggunakan skala likert. Sedangkan menurut Sugiyono (2010:93) adalah sebagai berikut :“Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.” Untuk setiap pilihan jawaban diberi skor, maka responden harus menggambarkan, mendukung pernyataan.Untuk digunakan jawaban yang dipilih. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak ukur menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Interpretasi data variabel Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2016 di Kabupaten Magetan dijabarkan menurut indikator variabel penelitian, seperti berikut ini.

1. Indikator Terwujudnya pengolahan sampah organik menjadi kompos

Hasil analisis data indikator terwujudnya pengolahan sampah organik menjadi kompos dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
Klasifikasi Indikator Terwujudnya pengolahan sampah organik menjadi kompos

Kategori	Jumlah Responden	Prosentase (%)
Sangat Baik	20	20,0
Baik	52	52,0
Cukup	14	14,0
Kurang	9	9,0
Sangat kurang	5	5,0
Jumlah	100	100,0

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa dari 100 responden atau 100% terdapat 20 responden atau 20% termasuk dalam kategori sangat baik, 52 responden atau 52% dalam kategori baik, 14 responden atau 14% dalam kategori cukup, dan 9 responden atau 9% dalam kategori kurang dan sebanyak 5 responden atau 5% dalam kategori sangat kurang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah Kabupaten Magetan dalam mewujudkan pengolahan sampah organik menjadi kompos dapat dikategorikan baik.

2. Indikator Meningkatkan kualitas lingkungan di Daerah

Hasil analisis data indikator meningkatnya kualitas lingkungan di daerah dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2
Klasifikasi Indikator Meningkatkan kualitas lingkungan di Daerah

Kategori	Jumlah Responden	Prosentase (%)
Sangat Baik	52	52,0
Baik	31	31,0
Cukup	6	6,0
Kurang	7	7,0
Sangat kurang	4	4,0
Jumlah	100	100,0

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa dari 100 responden atau 100% terdapat 20 responden atau 20% termasuk dalam kategori sangat baik, 52 responden atau 52% dalam kategori baik, 14 responden atau 14% dalam kategori cukup, dan 9 responden atau 9% dalam kategori kurang dan sebanyak 5 responden atau 5% dalam kategori sangat kurang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah Kabupaten Magetan dalam meningkatkan kualitas lingkungan di daerah dapat dikategorikan sangat baik.

3. Indikator Memanfaatkan sampah organik sebagai sumber daya yang bernilai ekonomis

Hasil analisis data indikator Memanfaatkan sampah organik sebagai sumber daya yang bernilai ekonomis dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3
Klasifikasi Indikator Memanfaatkan Sampah Organik Sebagai Sumber
Daya Yang Bernilai Ekonomis

Kategori	Jumlah Responden	Prosentase (%)
Sangat Baik	29	29,0
Baik	51	51,0
Cukup	9	9,0
Kurang	7	7,0
Sangat kurang	4	4,0
Jumlah	100	100,0

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa dari 100 responden atau 100% terdapat 29 responden atau 29% termasuk dalam kategori sangat baik, 51 responden atau 51% dalam kategori baik, 9 responden atau 9% dalam kategori cukup, dan 7 responden atau 7% dalam kategori kurang dan sebanyak 4 responden atau 4% dalam kategori sangat kurang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah Kabupaten Magetan dalam memanfaatkan sampah organik sebagai sumber daya yang bernilai ekonomis dapat dikategorikan baik.

4. Indikator Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah organik menjadi kompos

Hasil analisis data indikator Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah organik menjadi kompos dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4
Klasifikasi Indikator Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengolahan
Sampah Organik Menjadi Kompos

Kategori	Jumlah Responden	Prosentase (%)
Sangat Baik	54	54,0
Baik	27	27,0
Cukup	11	11,0
Kurang	3	3,0
Sangat kurang	5	5,0
Jumlah	100	100,0

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa dari 100 responden atau 100% terdapat 54 responden atau 54% termasuk dalam kategori sangat baik, 27 responden atau 27% dalam kategori baik, 11 responden atau 11% dalam kategori cukup, dan 3 responden atau 3% dalam kategori kurang dan sebanyak 5 responden atau 5% dalam kategori sangat kurang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah Kabupaten Magetan dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah organik menjadi kompos dapat dikategorikan sangat baik.

5. Indikator Melindungi sumber daya air, tanah, dan udara

Hasil analisis data indikator Melindungi sumber daya air, tanah, dan udara dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini.

Tabel 5
Klasifikasi Indikator Melindungi Sumber Daya Air, Tanah dan Udara

Kategori	Jumlah Responden	Prosentase (%)
Sangat Baik	54	54,0
Baik	27	27,0
Cukup	11	11,0
Kurang	3	3,0
Sangat kurang	5	5,0
Jumlah	100	100,0

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa dari 100 responden atau 100% terdapat 54 responden atau 54% termasuk dalam kategori sangat baik, 27 responden atau 27% dalam kategori baik, 11 responden atau 11% dalam kategori cukup, dan 3 responden atau 3% dalam kategori kurang dan sebanyak 5 responden atau 5% dalam kategori

sangat kurang sangat kurang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah Kabupaten Magetan dalam melindungi sumber daya air, tanah, dan udara dapat dikategorikan sangat baik.

- Variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2016 di Kabupaten Magetan
Hasil analisis data variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2016 di Kabupaten Magetan dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini.

Tabel 6
Klasifikasi Variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perda Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengolahan Sampah Organik Dengan Sistem Pengomposan

Kategori	Jumlah Responden	Prosentase (%)
Sangat Baik	54	54,0
Baik	28	28,0
Cukup	11	11,0
Kurang	6	6,0
Sangat kurang	1	1,0
Jumlah	100	100,0

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa dari 100 responden atau 100% terdapat 54 responden atau 54% termasuk dalam kategori sangat baik, 28 responden atau 28% dalam kategori baik, 11 responden atau 11% dalam kategori cukup, dan 6 responden atau 6% dalam kategori kurang dan sebanyak 1 responden atau 1% dalam kategori sangat kurang sangat kurang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengolahan Sampah Organik Dengan Sistem Pengomposan di Kabupaten Magetan dapat dikategorikan sangat baik.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

- Upaya pemerintah Kabupaten Magetan dalam mewujudkan pengolahan sampah organik menjadi kompos dapat dikategorikan baik
- Upaya pemerintah Kabupaten Magetan dalam meningkatkan kualitas lingkungan di daerah dapat dikategorikan sangat baik.
- Upaya pemerintah Kabupaten Magetan dalam memanfaatkan sampah organik sebagai sumber daya yang bernilai ekonomis dapat dikategorikan baik.
- Upaya pemerintah Kabupaten Magetan dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah organik menjadi kompos dapat dikategorikan sangat baik.
- Upaya pemerintah Kabupaten Magetan dalam melindungi sumber daya air, tanah, dan udara dapat dikategorikan sangat baik.
- Bahwa pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengolahan Sampah Organik Dengan Sistem Pengomposan di Kabupaten Magetan dapat dikategorikan sangat baik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini dapat terlaksana dengan baik karena kontribusi berbagai pihak. Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Merdeka Madiun, Ketua LPPM beserta staf yang telah membantu perijinan penelitian serta rekan-rekan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas sumbangsih dan sarannya sehingga penelitian ini dapat selesai tepat pada waktunya.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Asti M. S. Dan Sulistyawati. (2014). Keberadaan TPS Legal dan TPS Ilegal di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. *Jurnal Kesehatan Masyarakat volume 9 nomor 2 (2014) 122-130*. ISSN: 1858-1196.
- Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Fattah, Nanang. 2004. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara.
- Griffin. 2013. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hadari Nawawi, 2009. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, UGM Yogyakarta.
- Hardiatmi S. (2011) Pendukung Keberhasilan Pengelolaan Sampah Kota. *INNOFARM. Jurnal Inovasi Pertanian, 10 (1): 50-66*.
- Islamy, M Irfan. 2010. *Seri Policy Analysis*. Malang: Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang.
- Joko Widodo, 2010, *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kodoatie, R.J. dan Sjarief, Rustam, 2005. *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*. Yogyakarta: Andi.
- Koentjoroningrat, 2008. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Cetakan VIII, PT. Gramedia, Jakarta.
- M. Bungin, 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Prenada Media.
- Masri Singarimbun & Sofian Effendi, 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*, Penerbit LP3ES, Jakarta.
- Moch.Nazir. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhadjir Darwin, 2010, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Mulasari, S. A. (2012). Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Mengelola Sampah Di Dusun Padukuhan Desa Sidokarto Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Jurnal Kesmas*. volume 6 nomor 3: 204-211.
- Nasution, 2008. *Metode Research*, Summars, Bandung.
- Sahil J *et al.* (2016). Sistem Pengelolaan dan Upaya Penanggulangan Sampah di Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate. *Jurnal Bioedukasi volume 4 nomor 2*. ISSN: 2301-4678.
- Said Zainal Abidin, 2004, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Samodra Wibawa, 2009. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta Balai Pustaka.
- Slamet R. A. L. 2016. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Yogyakarta: Andi.
- Solichin Abdul Wahab, 2001, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Malang: UPT Unmuh. Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor T-12-1991-03.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta Rineka Cipta.
- Sutrisno Hadi, 2009. *Metodologi Research I*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Tachjan, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit, Unpad.
- Taliziduhu Ndraha, 2003, *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru*, Jilid 1, Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengolahan Sampah Organik Dengan Sistem Pengomposan.